



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN  
KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya serta untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Rumah Sakit Penyangga RSUD dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tenaga Non Kesehatan yang juga mendukung penanganan Pandemi *COVID-19*, perlu diberikan insentif/honorarium dan/atau santunan kematian;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif/honorarium dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mekanisme pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Begeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola anggaran *COVID-19*.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2 yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanganan *COVID-19*.
9. Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi rumah sakit penyangga untuk penanganan *COVID-19*.

10. Unit Pelaksana Tugas Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Labkes adalah Unit Pelaksana Tugas Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Rumah Sakit Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut RS Undana adalah rumah sakit milik Universitas Nusa Cendana yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi Rumah Sakit Penyanggah untuk Penanganan COVID-19.
12. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan COVID-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Teknis terkait dan stakeholder.
13. Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Dukungan Pelayanan dan Edukasi Bidang Kesehatan adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk melayani publik terkait informasi, promosi, edukasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 bidang kesehatan.
14. Tim Konsultan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) yang selanjutnya disebut Tim Konsultan adalah tenaga profesional yang menyediakan jasa konsultasi (*consultancy service*) dalam bidang ahli tertentu.
15. Tim Ahli atau Tim Pakar adalah tim yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu yang benar, baik, sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus tertentu.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan khususnya dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
17. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang di luar Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
18. Orang Tertentu adalah setiap orang yang melakukan upaya kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
19. Insentif adalah suatu sarana memotivasi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam bidang tugasnya.
20. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Insentif/honorarium dan/atau Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu dalam penanganan COVID-19 di Provinsi. 

**BAB II**  
**PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN**  
**DAN BESARAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 3

- (1) Insentif/honorarium diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD, RS Undana, RSJ Naimata, UPT Labkes dan Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum dan dokter gigi;
  - c. bidan;
  - d. perawat; dan
  - e. Tenaga Kesehatan lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dalam penanganan COVID-19.
- (4) Selain Insentif, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mendapatkan Santunan Kematian.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Satuan Tugas;
  - b. Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan;
  - c. Tim Konsultan;
  - d. Tim Ahli atau Tim Pakar; dan
  - e. Orang Tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung upaya penanganan COVID-19.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD dengan besaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi sebagai berikut:
  - a. Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dengan perawatan kategori gejala berat sebagai berikut:
    1. dokter spesialis paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
    2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan;
    3. perawat dan bidan paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
    4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/orang/bulan.
  - b. Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dengan perawatan kategori gejala sedang-ringan sebagai berikut:
    1. dokter spesialis paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang/bulan;
    2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
    3. perawat dan bidan paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
    4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang/bulan. *RS*

- c. Insentif Tenaga Kesehatan sebagai penanggung jawab Laboratorium *Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019* pada UPT Labkes dan RSJ Naimata pada Dinas sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (2) Besaran Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif/honorarium bagi Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
  - a. honorarium Satuan Tugas dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya umum;
  - b. honorarium Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya umum;
  - c. insentif Tim Konsultan dan Tim Ahli atau Tim Pakar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/orang/bulan; dan
  - d. insentif bagi Orang Tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung penanganan *COVID-19* dan dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan atau daftar jaga/shift dan *log book*, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.
- (4) Khusus honorarium untuk anggota Satuan Tugas dan Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hanya dapat diberikan sesuai keaktifan dan penugasan dari masing-masing ketua, koordinator bidang dan koordinator sekretariat.
- (5) Selain mendapatkan Insentif/honorarium, Satuan Tugas, Tim Dukungan Pelayanan Informasi dan Edukasi Bidang Kesehatan dan Orang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d, juga dapat menerima tambahan uang lembur jika melakukan jam kerja melebihi jam kerja.
- (6) Mekanisme pemberian dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada Peraturan Gubernur tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
- (7) Besaran Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan standar biaya.
- (8) Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi serta kemampuan keuangan negara dan daerah Provinsi.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF/HONORARIUM**  
**DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN TENAGA KESEHATAN,**  
**TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU**

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit kerja pada PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan *COVID-19*, mengajukan daftar penerima dan perhitungan Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur kepada kepala PD atau koordinator bidang pada Satuan Tugas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Kepala PD atau koordinator bidang pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui dan menyerahkan daftar penerima dan perhitungan Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur kepada bendahara pengeluaran PD pengelola anggaran *COVID-19*. *sc*

- (4) Bendahara pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap daftar penerima Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari kepala PD.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PD dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
  - a. keputusan Gubernur/surat tugas kepala PD; dan
  - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan Insentif.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PD dalam pembayaran Insentif/honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
  - a. surat tugas kepala PD; dan
  - b. rekapitulasi daftar penerima dan perhitungan honorarium/Insentif dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur bagi Tenaga Non Kesehatan dan Orang Tertentu.


### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk pemberian Insentif/Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan untuk pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, dibayarkan pada tahun anggaran 2021, yang meliputi:
  - a. dokter spesialis paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/bulan;
  - b. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan;
  - c. bidan dan perawat paling banyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
  - d. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 APRIL 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 020